



Penguatan Kapasitas BUMDes dan Prakarsa BUMDesma di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu

¹Teuku Fahmi, ²Yulianto

¹Sosiologi, Universitas Lampung, Indonesia

teuku.fahmi@fisip.unila.ac.id

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Indonesia

yulianto@fisip.unila.ac.id

© 2024 Kreativasi : *Journal of Community Empowerment*

ABSTRACT	INFO ARTIKEL
<p><i>The initiative to establish joint village-owned enterprises (BUMDesma), as local-scale village businesses run by BUMDes, has become increasingly common since the enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages. Developing these joint BUMDes is also a strategic policy of the current "Kabinet Indonesia Maju". This community service activity focuses on increasing the capacity of village-owned enterprise managers in Ambarawa District. The activities conducted are in the form of training and mentoring to improve the institutional capacity of each BUMDes in Ambarawa District. The methods used in this activity include: the stage of increasing cognitive aspects, the stage of mentoring and empowerment, and the stage of advocacy. Specifically, this community service activity has led to several achievements, including: in terms of cognitive aspects, there has been an increase in understanding of the existence of BUMDes in improving the village economy to become larger and stronger. The community service activities conducted have successfully increased the knowledge and understanding of the participants by 12.50%. In practical terms, there has been an emergence of initiatives to develop joint BUMDes among BUMDes managers in Ambarawa District.</i></p> <p>Keywords: <i>Capacity Building, Empowerment, Village-Owned Enterprises, Economy</i></p>	<p>Korespondensi : Teuku Fahmi Email: teuku.fahmi@fisip.unila.ac.id</p>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa yang disahkan pada tahun 2014 telah menempatkan pembangunan desa sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia. Praktik pengembangan ini mengalihkan wewenang pembangunan dari pusat ke desa, lalu juga memberikan desa 'kebebasan' untuk merancang dan menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalnya. Pembangunan yang dimaksud tersebut tidaklah hanya terbatas pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga mencakup pada usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan berbagai program pemberdayaan.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia masih lekat dengan beberapa isu yang berkenaan dengan: wilayah yang terabaikan atau tertinggal (Malau & Hotman, 2023), teralienasi atau terpinggirkan (Faoziyah & Salim, 2020), tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan (Arifin et al., 2020), dsb. Karena itu, pemerintahan saat ini memberikan perhatian lebih pada upaya peningkatan kesejahteraan desa. Bentuk nyata dari komitmen tersebut dapat dilihat dari lahirnya kebijakan Dana Desa pada tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Pengalokasian dana desa dapat dimanfaatkan untuk beragam aktivitas pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan perekonomian warga lokal. Dalam UU Desa tersebut juga telah termaktub pengerangkaan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang diharapkan yakni dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui regulasi inilah terus diupayakan bermunculan sejumlah BUMDes yang menjalankan usaha skala lokal di tingkat desa.

Kajian mengenai dampak BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat telah menjadi fokus perhatian dari para peneliti. Hasil studi menunjukkan bahwa usaha BUMDes telah menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal (Ridlwan, 2014; Irianto & Wati, 2022). Kajian lainnya juga menyebutkan bahwa jumlah BUMDES yang hampir mencapai 50.000 di

seluruh Indonesia telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengelolaan kelembagaan, inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan, sehingga mendorong perekonomian desa (Fafurida, Karsinah, & Bowo, 2022).

Meskipun demikian, beberapa kajian lainnya juga telah mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi BUMDes di Indonesia, semisal: berkaitan dengan masalah regulasi yang mempersulit pendirian dan pengoperasian BUMDes (Kania et al., 2021), lalu kurangnya fungsi akuntabilitas yang pada akhirnya mengarah pada tata kelola dan manajemen keuangan yang tidak efektif (Purbawati & Ainuddin, 2019). Sementara itu penelitian lain juga menyoroti mengenai kurang terampilnya personalia dalam mengelola BUMDes dan minimnya kemampuan literasi teknologi yang menghambat penerapan sistem manajemen berbasis daring (Muda & Erlina, 2020).

UU Desa tidak hanya mendorong pada pembentukan BUMDes di tingkat desa saja, tetapi juga membuka peluang bagi beberapa desa untuk bekerja sama membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Meski demikian, pengembangan BUMDesma sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan perdesaan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa kendala yang umum ditemui meliputi kurangnya pemahaman mengenai konsep, regulasi, dan praktik BUMDesma itu sendiri, hingga kesulitan dalam memilih jenis usaha yang tepat, serta minimnya dukungan dari berbagai pihak terkait.

Untuk itulah diperlukan tata kelola yang profesional dalam pengelolaan BUMDesma agar dapat berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan pemahamannya mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDesma. Dengan demikian, BUMDesma dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa, terutama di desa-desa yang berstatus tertinggal dan berkembang.

Berdasarkan penelusuran awal, beberapa desa di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu telah didirikan BUM Desa dengan beragam jenis skala usaha (Tabel 1). Umumnya usaha yang ada di beberapa desa tersebut memiliki spesifikasi, kekhasan, bahkan keunggulan dengan mengacu potensi desa tersebut. Sebagaimana

diketahui, sebagian besar wilayah Kecamatan Ambarawa memiliki potensi air tanah (air mineral) layak konsumsi yang berlimpah. Untuk itu, terdapat juga beragam usaha rumah tangga yang mengelola air minum kemasan untuk dipasarkan.

Tabel 1. Data BUMDes di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu

No.	Nama Desa	Nama BUMDes	Status Desa
1	Kresnomulyo	Kresno Jaya	Maju
2	Sumber Agung	Sumber Makmur	Berkembang
3	Ambarawa	Jaya Abadi	Mandiri
4	Ambarawa Barat	Mitraku	Berkembang
5	Tanjung Anom	Anom Mandiri	Maju
6	Jati Agung	Agung Sejati	Maju
7	Margodadi	Karya Mandiri	Maju
8	Ambarawa Timur	Cinta Karya	Maju

Sumber: Olahan data tim pengabdian Unila, 2023

Potensi alam yang ada di Kecamatan Ambarawa juga dimanfaatkan baik oleh sebagian besar BUMDes yang ada di kecamatan tersebut untuk mengeksplorasi air tanah lalu dijadikan air minum kemasan dan dipasarkan secara luas. Meskipun demikian, pengelolaan jenis usaha tersebut tidak terlepas dari beragam kendala, diantaranya mulai dari masalah manajerial hingga pemasaran kerap ditemui oleh para pengelola BUMDes di Kecamatan Ambarawa.

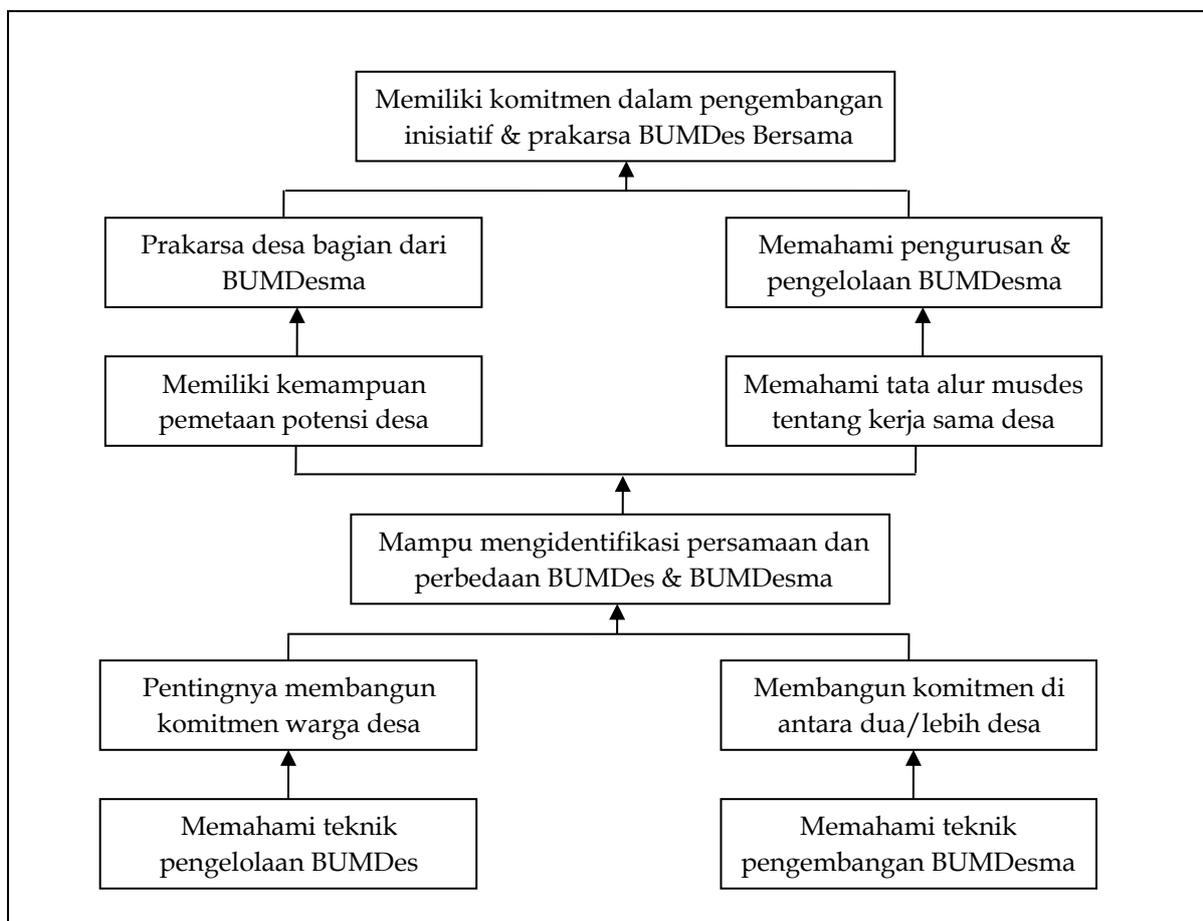
Untuk itu kegiatan pengabdian ini memfokuskan pada upaya pemberian pelatihan dan pendampingan agar aspek manajerial dari BUMDes yang ada di Kecamatan Ambarawa dapat dilakukan secara optimal. Tim pengabdian juga menaruh perhatian pada upaya penajakan dan kolaborasi di antara BUMDes antardesa tersebut dengan membentuk BUMDesma sehingga dengan begitu akan mampu berkontribusi positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan para stakeholders di Kecamatan Ambarawa, mulai dari para aparatur kecamatan, perangkat desa, dan juga para pengelola BUM Desa yang ada di Kecamatan Ambarawa. Adapun jumlah peserta yang terlibat ada sebanyak 40 orang yang mayoritas merupakan para pengelola BUMDes di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten

Pringsewu. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Balai Pertemuan Kecamatan Ambarawa, Kab. Pringsewu.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini juga melibatkan tim mahasiswa Universitas Lampung yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Ambarawa. Oleh karenanya, dalam tahapan rancangan kegiatan tim pengabdian kerap melakukan beberapa kali diskusi dengan tim mahasiswa tersebut untuk memetakan beragam permasalahan yang dialami oleh mitra, lalu mempersiapkan beragam hal teknis terkait dengan pelaksanaan pelatihan, hingga tahapan evaluasi akhir dari penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini.



Gambar 1. Alur Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

Sumber: Olahan tim pengabdian Unila, 2023

Rangkaian kegiatan pengabdian dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan yang terbagi ke dalam empat tahapan aktivitas, yakni: persiapan pelaksanaan, sosialisasi, evaluasi, dan pelaporan. Adapun untuk kerangka pemecahan permasalahan mitra disusun berdasarkan dari hasil pemetaan yang telah dilakukan

oleh mahasiswa yang melakukan KKN di Kecamatan Ambarawa (Gambar 1). Untuk itu tim pengabdian menyodorkan alternatif solusi pada upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) para pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) dan peninjauan BUMDesma di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) para pengelola BUMDes di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan mengenai teknik dan strategi pengelolaan hingga pengembangan BUMDes. Lingkup materi pelatihan yang diberikan dalam sosialisasi mencakup beberapa tahap, di antaranya: pertama, BUMDes dan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat perdesaan; kedua, pengembangan dan pengelolaan BUMDes, dan; ketiga, prakarsa pendirian atau pembentukan BUMDesma.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian Unila, 2023

Pada tataran teknis, peserta juga diberikan tugas kelompok untuk menemukenali berbagai potensi desa. Identifikasi pemetaan potensi desa ini penting dilakukan dalam upaya peninjauan pengembangan BUMDesma di Kecamatan Ambarawa. Untuk selanjutnya, hasil identifikasi dari tiap kelompok mengenai potensi desa ini dilakukan proses *crosscheck* melalui observasi langsung ke beberapa

desa yang ada di Kecamatan Ambarawa guna mendapatkan gambaran lebih nyata sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pembentukan BUMDesma.



Gambar 3. Pemetaan Potensi Wisata Hijau di Kecamatan Ambarawa
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian Unila, 2023

Hasil observasi lapangan tim pengabdian Unila dijadikan bahan masukan pada sesi diskusi dan juga sesi simulasi musyawarah antardesa yang dilakukan di Ruang Pertemuan Kec. Ambarawa. Mengacu dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa perdesaan di Kec. Ambarawa memiliki beberapa potensi lokal yang dapat bernilai ekonomis. Lingkungan yang asri dapat dijadikan pengembangan wisata hijau pada beberapa desa. Selain itu, terdapat juga aliran sungai yang akan dikembangkan menjadi lokasi wisata seperti arung jeram atau wisata air lainnya.

Terkait dengan pengembangan wisata hijau pada beberapa desa di Kec. Ambarawa, beberapa faktor perlu dipertimbangkan, semisal faktor sarana prasarana, lalu kapasitas sumber daya manusia lokal dalam mengidentifikasi potensi wisata di wilayah tersebut. Adapun terkait dengan pengembangan BUMDes yang kemudian diinisiasi menjadi BUMDesma maka perlu mengoptimalkan potensi desa yang berada di kawasan perdesaan tersebut. Dalam hal ini, tim pengabdian Unila merefleksikan bahwa memang perlu tahapan yang lebih panjang dan juga dibutuhkan sinergi/kolaborasi, baik antar desa, pendamping desa, dan *stakeholders* lainnya, dalam mengekspansi jenis usaha yang akan dijalankan dalam BUMDesma.

Mengacu dari serangkaian proses pelatihan dan simulasi musyawarah antardesa, terkhusus pada prakarsa pendirian atau pembentukan BUMDesma di Kecamatan Ambarawa, terungkap bahwa ada beberapa kendala teknis yang ada di beberapa desa pada kecamatan tersebut sehingganya akan berpengaruh pada wacana pendirian dan pembentukan BUMDesma di Kec. Ambarawa. BUMDes yang ada di beberapa desa di Kecamatan Ambarawa sejauh ini masih memang belum melakukan kolaborasi dengan BUMDes lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya:

- Aspek pengelolaan atau manajerial yang masih terus perlu dikuatkan secara organisasi. Dalam hal ini penguatan kapasitas para pengelola BUMDes ditiap pekon perlu menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan.
- Skala usaha yang masih cenderung pada penyediaan barang pokok & belum mengedepankan potensi desa yang ada di Kecamatan Ambarawa.

Identifikasi dua faktor kendala di atas ditemukan pada kasus BUMDesma yang baru berdiri atau dibentuk. Studi yang dilakukan Bisri et al. (2003) mengungkap beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan tata kelola kolaboratif dalam BUMDesma, mencakup aspek perbedaan kepentingan, kurangnya kapasitas para pengelola, hingga munculnya persaingan antar pemerintah desa yang berujung pada tidak adanya komitmen bersama dalam memajukan BUMDesma. Kajian lainnya yang dilakukan Prameswari (2022) juga menunjukkan hal yang kurang lebih sama, tidak optimalnya pengelolaan BUMDesma disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas dari para pengelola. Kinerja yang tidak profesional ini terlihat dari kurangnya koordinasi antar anggota, ketidakjelasan laporan keuangan, RUPS, dan masalah bagi hasil.

Berkaitan dengan evaluasi pelatihan, tim pengabdian Unila melakukan penilaian pretest dan posttest dalam rangka mengukur efektivitas pelatihan dan memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat bagi peserta/mitra. Adapun kisi pertanyaan dalam evaluasi pelatihan didesain dengan para peserta dimintakan penilaian/ tanggapannya (apakah benar atau salah) pada lima pernyataan berikut:

1. Salah satu tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,

2. Modal yang digunakan untuk mendirikan BUMDes tidak diambil dari anggaran pendapatan dan belanja desa,
3. Kekayaan alam desa bisa menjadi modal utama dalam menjalankan usaha BUMDes,
4. Pembentukan BUMDesma dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah desa tanpa melibatkan pihak lain, dan
5. Proses pendirian BUMDesma tidak selalu memerlukan peraturan desa sebagai dasar hukumnya.

Mengacu hasil evaluasi *pretest* dan *posttest* dari 40 peserta, diperoleh peningkatan nilai rata-rata hitung (*mean*) sebesar 12,5 poin. Nilai *mean* pretest untuk seluruh peserta sebesar 66,50 sedangkan pada hasil *posttest* meningkat menjadi 79, berdasarkan statistik tersebut maka secara keseluruhan pelatihan yang dilakukan telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta dengan nilai rata-rata sebesar 12,5 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan pada BUMDes di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah berhasil meningkatkan pemahaman para pengelola tentang pentingnya pengelolaan BUMDes yang profesional dan potensi pengembangan BUMDesma. Berkaitan dengan prakarsa pengembangan BUMDesma, tim pengabdian melihat bahwa Kecamatan Ambarawa memiliki potensi besar untuk mengembangkan BUMDesma. Hal ini tercermin dari dua potensi utama, yakni (1) sumber daya alam: keberadaan sumber daya alam seperti sungai dan lingkungan yang asri dapat dikembangkan menjadi potensi wisata, dan; (2) kolaborasi antar desa: dengan adanya kesamaan potensi tersebut, desa-desa di Kecamatan Ambarawa dapat bekerja sama untuk mengembangkan usaha bersama melalui BUMDesma. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam upaya pembentukan BUMDesma, yaitu: (1) para pengelola BUMDes masih perlu pendampingan dalam hal peningkatan kapasitas, terutama dalam hal manajemen organisasi dan pengembangan usaha yang lebih inovatif, dan; (2) pentingnya menjalin komunikasi

dan kolaborasi antar BUMDes dalam pembentukan BUMDesma atas dasar kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini di antaranya: (1) memfokuskan pada penguatan kapasitas pengelola bisa saja dalam bentuk forum diskusi antar pengelola BUMDes untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, (2) melakukan pengembangan usaha yang lebih inovatif yang dapat dibarengi dengan membangun kemitraan dengan pihak luar (semisal: perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau pelaku usaha) untuk mendapatkan dukungan teknis dan akses pasar, dan (3) melakukan kajian mendalam terhadap potensi dan kebutuhan masing-masing desa sebelum membentuk BUMDesma. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan BUMDes di Kecamatan Ambarawa dapat berkembang lebih baik dan BUMDesma dapat terbentuk dengan solid, sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., . . . Ariutama, G. A. (2020). Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia. *Journal of rural studies*, 79, 382-394. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Bisri, M. H., Sumartono, S., Muluk, M., & Wijaya, A. F. (2023). Context and Purpose of Collaborative Governance in Rural Development in Joint Village-Owned Enterprises (BUMDesma): Choice or Motivation? *International Journal for Multidisciplinary Research*, 5(5). doi:<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6796>
- Fafurida, Karsinah, & Bowo, P. A. (2022). Scale-Up Collaboration Model of Village-Owned Enterprises for Increasing Village Economy. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8). doi:<https://doi.org/10.18280/ijstdp.170830>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97-121. doi:<https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Irianto, O., & Wati, C. H. S. (2022). *The Impact of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Strengthening Food Security in Merauke Regency*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A New Approach to Stimulate Rural Entrepreneurship Through Village-Owned Enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 15(3), 432-450. doi:<https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Malau, A. G., & Hotman, J. (2023). The Influence of Village Fund on the Job Market and Economic Growth in Dairi Regency. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(3), 311-318. doi:10.15379/ijmst.v10i3.1536
- Muda, I., & Erlina, E. (2020). Sustainable HR Development to Support Successful Implementation of Offline Accounting Apps by Rural Enterprises in Indonesia. *Journal of International Studies* (2071-8330), 13(4). doi:<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2020/13-4/5>
- Prameswari, N. A. C., & Kushandajani. (2022). Analysis of Joint Village Owned Business Entities in Good Governance Perspective (Case Study of BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 87-99.
- Purbawati, D., & Ainuddin, I. (2019). *The Principle of Accountability on the Financial Management of Bumdes in Tembarak District Temanggung Regency, Indonesia*. Paper presented at the Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, Granada, Spain.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 8(3), 424-440. doi:<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>